



**MODEL SINERGIS PENGEMBANGAN DAERAH NODAL
SEBAGAI KESATUAN WILAYAH PERENCANAAN DALAM
LINGKUP KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH: KASUS
WILAYAH TAPAL KUDA JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh :

**Asri Restiana F
NIM. 061510291011**

**JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/AGRIBIBNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JEMBER
2011**



**MODEL SINERGIS PENGEMBANGAN DAERAH NODAL
SEBAGAI KESATUAN WILAYAH PERENCANAAN DALAM
LINGKUP KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH: KASUS
WILAYAH TAPAL KUDA JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan
Program Sarjana Pada Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Jember

Oleh :
Asri Restiana F
NIM. 061510291011

**JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/AGRIBIBNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JEMBER
2011**

SKRIPSI BERJUDUL

**MODEL SINERGIS PENGEMBANGAN DAERAH NODAL
SEBAGAI KESATUAN WILAYAH PERENCANAN DALAM
LINGKUP KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH: KASUS
WILAYAH TAPAL KUDA JAWA TIMUR**

Oleh :

**Asri Restiana F
NIM. 061510291011**

Pembimbing:

**Pembimbing Utama : Djoko Sojono, SP. MP.
Pembimbing Anggota : Dr. Ir. Sugeng Raharto, MS.**

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul: **Model Sinergis Pengembangan Daerah Nodal Sebagai Kesatuan Wilayah Perencanaan Dalam Lingkup Kebijakan Otonomi Daerah: Kasus Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur** , telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Pertanian pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Oktober 2011
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Pertanian UNEJ

Tim Penguji
Penguji 1

Djoko Soejono, SP. MP.
NIP. 197001151997021002

Penguji 2

Penguji 3

Dr. Ir. Sugeng Raharto, MS
NIP. 195202221980021001

Dr. Ir. Evita Soliha Hani, MP
NIP. 196309031990022001

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Ir. Bambang Hermiyanto, M.P
NIP. 196111101988021001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jember :

Nama : Asri Restiana F

NIM : 061510291011

Menyatakan bahwa :

1. Penelitian Model Sinergis Pengembangan Daerah Nodal Sebagai Kesatuan Wilayah Perencanaan Dalam Lingkup Kebijakan Otonomi Daerah: Kasus Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur.
2. Penyusunan KIT ini dilaksanakan sendiri tanpa menyadur atau mencontek (plagiat) pada KIT yang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam KIT ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Saya sanggup atau bersedia menerima sanksi apabila KIT ini merupakan hasil mencontek.

Jember, 26 Oktober 2011

Yang Menyatakan,

Asri Restiana Febrianti
NIM. 061510291011

RINGKASAN

Model Sinergis Pengembangan Daerah Nodal Sebagai Kesatuan Wilayah Perencanaan Dalam Lingkup Kebijakan Otonomi Daerah: Kasus Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur. Asri Restiana F, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Istilah wilayah Tapal Kuda tersebut muncul menjelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 1977, disebut wilayah Tapal Kuda tersebut pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sub-wilayah, yaitu sub-wilayah: (a) Pulau Madura, (b) Teluk Madura, dan (c) Selat Madura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang dapat berpotensi menjadi pendorong dan penghambat guna mengembangkan wilayah tapal kuda sebagai daerah nodal menjadi kesatuan wilayah perencanaan di dalam lingkup otonomi daerah serta untuk mengetahui alternatif model sinergis yang dapat dipandang efektif dan efisien guna mengembangkan wilayah tapal kuda sebagai daerah nodal menjadi kesatuan wilayah perencanaan di dalam lingkup otonomi daerah. Alat analisis yang dipergunakan adalah pendekatan analisis metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan triangulasi sumber dan data.

Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) faktor yang dapat berpotensi menjadi pendorong dan (2) faktor yang dapat berpotensi menjadi penghambat, dapat ditinjau dari 4 aspek yaitu : politis, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Dimana keempat aspek tersebut ditujukan guna mewujudkan kemungkinan wilayah Tapal Kuda sebagai daerah nodal menjadi kesatuan wilayah perencanaan kebijakan otonomi daerah (3) Alternatif model sinergis yang dipandang efektif dan efisien guna mewujudkan kemungkinan wilayah Tapal Kuda sebagai daerah nodal menjadi kesatuan wilayah perencanaan di dalam lingkup kebijakan otonomi daerah, adalah pengembangan ekonomi terpadu kawasan andalan

SUMMARY

Synergistic Model of Nodal Region Development as Unity of Planning Area in Scope of Region Autonomy Policy : Case of East Java Horseshoe. Asri Restiana F, Agriculture Economic Social Major, Agriculture Faculty, Jember University.

The term of Horse Shoe area appears by the time of general election (Pemilu) implementation in 1977. It is called the Horse Shoe area because it can be divided into 3 (three) sub-areas, which are sub-area: (a) Madura Island, (b) Madura Bay, and (c) Madura Strait. This study intends to find out factor which can potentially be a supporting or barrier in order to develop horse shoe area as nodal region to be unity of planning area in region autonomy scope and also to find out synergistic model alternative which can be viewed as effective and efficient in order to develop horse shoe area as nodal region to be unity of planning area in region autonomy scope. Analysis tool used is qualitative descriptive method analysis approach. The obtained data is analyzed by using triangulation of source and data.

Analysis result shows that : (1) factor which can potentially be a supporting and (2) factor which can potentially be a barrier, can be observed from 4 aspects, which are : political, economy, social, and institutional, where those four aspects is aimed to realize possibility of Horse Shoe area as nodal region to be unity of region autonomy policy planning area (3) possibility of Horse Shoe area as nodal region to be unity of planning area in region autonomy policy scope is the development of reliable region integrated economy

PRAKATA

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah tertulis yang berjudul **Model Sinergis Pengembangan Daerah Nodal Sebagai Kesatuan Wilayah Perencanaan Dalam Lingkup Kebijakan Otonomi Daerah: Kasus Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur** sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Strata Satu (S-1) pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan karya ilmiah tertulis ini, yaitu:

1. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember.
2. Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember.
3. Djoko Soejono, SP, MP, Dr. Ir. Sugeng Raharto, MS dan Dr. Ir. Evita Soliha Hani, MP dan Agus Soetriono, SP. M.P yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan karya ilmiah tertulis ini.
4. Luh Putu Suciati, SP. MP selaku dosen pembimbing akademik.
5. Program IM-HERE yang telah mendanai penelitian ini.
6. Orang tua, saudara, keluarga dan mas Aditya Angga Nugraha yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak terhingga.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan/Kota (BAPPEDA dan BAPPEKOT) dan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi (BAPPEPROV) beserta staf karyawan yang telah membantu dalam pengumpulan data.
8. Teman-teman 2006 yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu terselesainya penulisan skripsi ini

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan karya ilmiah tertulis ini.

Jember,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	8

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Konsepsi Daerah	13
2.2.1 Perspektif Pandangan Subjektif	14
2.2.2 Perspektif Pandangan Objektif	14
2.3 Unit Daerah dalam Konteks Analisis Ekonomi Regional	18
2.4 Konsepsi Ekonomi Regional	20
2.5 Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Perekonomian Regional	20
2.6 Konsepsi Otonomi Daerah	22

2.7 Benturan Kepentingan Antara Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu.....	27
2.8 Pemaduan Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu di dalam Lingkup Kebijakan Otonomi Daerah	28
2.9 Kerangka Pemikiran	35

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Penentuan Daerah Penelitian.....	39
3.2 Metode Penelitian	39
3.3 Metode Pengumpulan Data	39
3.4 Metode Pendekatan Analisis.....	40
3.4.1 Triangulasi Data.....	42
3.4.1 Triangulasi Metode	43
3.5 Terminologi	43

BAB 4. GAMBARAN UMUM

4.1 Kondisi Perekonomian Regional.....	46
4.2 Perkembangan Potensi Basis Sektor & Sub-Sektor Pertanian	47
4.2.1 Di Sub Wilayah Pulau Madura	47
4.2.2 Di Sub Wilayah Teluk Madura	54
4.2.3 Di Sub Wilayah Selat Madura	55
4.3 Sektor dan Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian	57
4.4 Sektor dan Sub Sektor Industri dan Pengolahan	62
4.4.1 Sub Wilayah Teluk Madura.....	68
4.4.2 Sub Wilayah Selat Madura	70
4.5 Sektor dan Sub Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	70
4.5.1 Sub Wilayah Teluk Madura.....	74
4.5.2 Sub Wilayah Selat Madura	75
4.6 Sektor Bangunan/Konstruksi	76
4.7 Sektor dan Sub Sektor Perdagangan	78

4.7.1 Sub Wilayah Selat Madura	81
4.7.2 Sub Wilayah Teluk Madura	82
4.8 Sektor dan Sub Sektor Pengangkutan dan Komunikasi.....	83
4.9 Sektor dan Sub Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	92
4.10 Sektor dan Sub Sektor Jasa-Jasa	97

BAB 5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Faktor-Faktor Yang Dapat Berpotensi Menjadi Pendorong.....	104
5.1.1 Tinjauan Aspek Politis	104
5.1.2 Tinjauan Aspek Ekonomi.....	108
5.1.3 Tinjauan Aspek Sosial.....	115
5.1.4 Tinjauan Aspek Kelembagaan.....	116
5.2 Faktor-Faktor Yang Dapat Berpotensi Menjadi Penghambat.....	121
5.2.1 Tinjauan Aspek Politis	121
5.2.2 Tinjauan Aspek Ekoonomi.....	125
5.2.3 Tinjauan Aspek Sosial.....	126
5.2.4 Tinjauan Aspek Kelembagaan.....	127
5.3 Alternatif Model Sinergis Yang Dapat Dipandang Efektif dan Efisien	128
5.3.1 Sebaran Andalan Sektor Pertanian	129
5.3.2 Sebaran Andalan Sektor Pertambangan dan Penggalian.....	136
5.3.3 Sebaran Andalan Sektor Industri dan Pengolahan	137
5.3.4 Sebaran Andalan Sektor Listrik, Gas & Air Bersih	141
5.3.5 Sebaran Andalan Sektor Bangunan dan Konstruksi.....	143
5.3.6 Sebaran Andalan Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran ...	144
5.3.7 Sebaran Andalan Sektor Pengangkutan & Komunikasi.....	146
5.3.8 Sebaran Andalan Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan.....	150
5.3.9 Sebaran Andalan Jasa-Jasa.....	152

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.....	156
6.2 Saran	160

DAFTAR PUSTAKA	165
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	167
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
4.1	Nilai LQ Ratio Sektor dan Sub Sektor Pertanian di Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda – Provinsi Jawa Timur,Pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah	49
4.2	Nilai LQ Ratio Sektor dan Sub Sektor Pertanian di Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda – Provinsi Jawa Timur,Pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah	50
4.3	Perubahan (Kenaikan/Penurunan) Tingkat Potensi Basis Sektor dan Sub Sektor Pertanian di Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda – Provinsi Jawa Timur,Pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	53
4.4	Nilai LQ Ratio Sektor dan Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian di Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda – Provinsi Jawa Timur,Pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	59
4.5	Potensi Basis Sektor dan Sub Sektor Pertambangan di Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda – Provinsi Jawa Timur,Pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah	60
4.6	Perubahan (Kenaikan/Penurunan) Tingkat Potensi Basis Sektor dan Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian di Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda – Provinsi Jawa Timur,Pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah	61
4.7	Nilai LQ Ratio Sektor dan Sub Sektor Industri dan Pengolahan di Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda – Provinsi Jawa Timur,Pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	64

4.8	Potensi Basis Sektor dan Sub Sektor Industri dan Pengolahan di Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda – Provinsi Jawa Timur,Pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah	66
4.9	Perubahan (Kenaikan/Penurunan) Tingkat Potensi Basis Sektor dan Sub Sektor Industri dan Pengolahan di Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda – Provinsi Jawa Timur,Pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah	69
4.10	Nilai LQ Ratio Sektor dan Sub Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih di Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda – Provinsi Jawa Timur,Pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	72
4.11	Potensi Basis Sektor dan Sub Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih di Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda – Provinsi Jawa Timur,Pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	73
4.12	Perubahan (Kenaikan/Penurunan) Tingkat Potensi Basis Sektor dan Sub Sektor Industri dan Pengolahan di Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda – Provinsi Jawa Timur,Pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah	74
4.13	Nilai LQ Ratio Sektor dan Sub Sektor Bangunan/Konstruksi di Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda – Provinsi Jawa Timur,Pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah	76
4.14	Nilai LQ Ratio Sektor dan Sub Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda – Provinsi Jawa Timur,Pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	79
4.15	Potensi Basis Sektor dan Sub Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda –	

Provinsi Jawa Timur,Pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	80
4.16 Perubahan (Kenaikan/Penurunan) Tingkat Potensi Basis Sektor dan Sub Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda – Provinsi Jawa Timur,Pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	82
4.17 Nilai LQ Ratio Sektor dan Sub Sektor Pengangkutan dan Komunikasi di Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur,Pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	85
4.18 Potensi Basis Sektor dan Sub Sektor Pengangkutan dan Komunikasi di Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur,Pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	87
4.19 Perubahan (Kenaikan/Penurunan) Tingkat Potensi Basis Sektor dan Sub Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda - Provinsi Jawa Timur,Pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	89
4.20 Nilai LQ Ratio Sektor dan Sub Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan di Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda – Provinsi Jawa Timur,Pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	94
4.21 Potensi Basis Sektor dan Sub Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan di Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda – Provinsi Jawa Timur,Pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	95
4.22 Perubahan (Kenaikan/Penurunan) Tingkat Potensi Basis Sektor dan Sub Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda – Provinsi Jawa Timur,Pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah	96

4.23	Nilai LQ Ratio Sektor dan Sub Sektor Jasa-Jasa Perusahaan di Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda – Provinsi Jawa Timur,Pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah	98
4.24	Potensi Basis Sektor dan Sub Sektor Jasa-Jasa Perusahaan di Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda – Provinsi Jawa Timur,Pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah	99
4.25	Perubahan (Kenaikan/Penurunan) Tingkat Potensi Basis Sektor dan Sub Sektor Jasa-Jasa di Dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda – Provinsi Jawa Timur,Pada Periode Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	100
5.1	Hasil Identifikasi Faktor-Faktor Yang Dapat Berpotensi Menjadi Pendorong Guna Mengembangkan Wilayah Tapal Kuda Sebagai Daerah Nodal Menjadi Kesatuan Wilayah Perencanaan di Dalam Lingkup Kebijakan Otonomi Daerah: Tinjauan Aspek Politis.....	105
5.2	Hasil Identifikasi Faktor-Faktor Yang Dapat Berpotensi Menjadi Pendorong Guna Mengembangkan Wilayah Tapal Kuda Sebagai Daerah Nodal Menjadi Kesatuan Wilayah Perencanaan di Dalam Lingkup Kebijakan Otonomi Daerah: Tinjauan Aspek Ekonomi	108
5.3	Hasil Identifikasi Faktor-Faktor Yang Dapat Berpotensi Menjadi Pendorong Guna Mengembangkan Wilayah Tapal Kuda Sebagai Daerah Nodal Menjadi Kesatuan Wilayah Perencanaan di Dalam Lingkup Kebijakan Otonomi Daerah: Tinjauan Aspek Sosial	115
5.4	Hasil Identifikasi Faktor-Faktor Yang Dapat Berpotensi Menjadi Pendorong Guna Mengembangkan Wilayah Tapal Kuda Sebagai Daerah Nodal Menjadi Kesatuan Wilayah Perencanaan di Dalam Lingkup Kebijakan Otonomi Daerah: Tinjauan Aspek Kelembagaan.....	116
5.5	Hasil Identifikasi Faktor-Faktor Yang Dapat Berpotensi Menjadi Pendorong Guna Mengembangkan Wilayah Tapal Kuda Sebagai	

	Daerah Nodal Menjadi Kesatuan Wilayah Perencanaan di Dalam Lingkup Kebijakan Otonomi Daerah: Tinjauan Aspek Politis.....	122
5.6	Hasil Identifikasi Faktor-Faktor Yang Dapat Berpotensi Menjadi Pendorong Guna Mengembangkan Wilayah Tapal Kuda Sebagai Daerah Nodal Menjadi Kesatuan Wilayah Perencanaan di Dalam Lingkup Kebijakan Otonomi Daerah: Tinjauan Aspek Ekonomi	125
5.7	Hasil Identifikasi Faktor-Faktor Yang Dapat Berpotensi Menjadi Pendorong Guna Mengembangkan Wilayah Tapal Kuda Sebagai Daerah Nodal Menjadi Kesatuan Wilayah Perencanaan di Dalam Lingkup Kebijakan Otonomi Daerah: Tinjauan Aspek Sosial	126
5.8	Hasil Identifikasi Faktor-Faktor Yang Dapat Berpotensi Menjadi Pendorong Guna Mengembangkan Wilayah Tapal Kuda Sebagai Daerah Nodal Menjadi Kesatuan Wilayah Perencanaan di Dalam Lingkup Kebijakan Otonomi Daerah: Tinjauan Aspek Kelembagaan.....	128
5.9	Pengembangan Ekonomi Terpadu Berbasis Spesifik Lokalita di dalam Alternatif Model Wilayah Tapal Kuda Dikembangkan Sebagai Kawasan Andalan: Lingkup Sektor Pertanian.....	130
5.10	Pengembangan Ekonomi Terpadu Berbasis Spesifik Lokalita di dalam Alternatif Model Wilayah Tapal Kuda Dikembangkan Sebagai Kawasan Andalan: Lingkup Sektor Pertambangan dan Penggalan.....	136
5.11	Pengembangan Ekonomi Terpadu Berbasis Spesifik Lokalita di dalam Alternatif Model Wilayah Tapal Kuda Dikembangkan Sebagai Kawasan Andalan: Lingkup Sektor Industri dan Pengolahan	138
5.12	Pengembangan Ekonomi Terpadu Berbasis Spesifik Lokalita di dalam Alternatif Model Wilayah Tapal Kuda Dikembangkan Sebagai Kawasan Andalan: Lingkup Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.....	141
5.13	Pengembangan Ekonomi Terpadu Berbasis Spesifik Lokalita di dalam Alternatif Model Wilayah Tapal Kuda Dikembangkan Sebagai Kawasan Andalan: Lingkup Sektor Bangunan/Konstruksi	143

5.14	Pengembangan Ekonomi Terpadu Berbasis Spesifik Lokalita di dalam Alternatif Model Wilayah Tapal Kuda Dikembangkan Sebagai Kawasan Andalan: Lingkup Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	144
5.15	Pengembangan Ekonomi Terpadu Berbasis Spesifik Lokalita di dalam Alternatif Model Wilayah Tapal Kuda Dikembangkan Sebagai Kawasan Andalan: Lingkup Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	146
5.16	Pengembangan Ekonomi Terpadu Berbasis Spesifik Lokalita di dalam Alternatif Model Wilayah Tapal Kuda Dikembangkan Sebagai Kawasan Andalan: Lingkup Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	150
5.17	Pengembangan Ekonomi Terpadu Berbasis Spesifik Lokalita di dalam Alternatif Model Wilayah Tapal Kuda Dikembangkan Sebagai Kawasan Andalan: Lingkup Sektor Jasa-Jasa	152
6.1	Alternatif Pengembangan Spesifik yang Dapat Dipandang Relatif Tepat Dalam Model Wilayah Tapal Kuda Sebagai Kawasan Andalan	161

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.1	Sketsa Peta Kesatuan Wilayah Tapal Kuda di Provinsi Jawa Timur	2
1.2	Sketsa Peta Kesatuan Wilayah Pengembangan Ekonomi Ruang Terintegrasi/Terpadu Gerbongkertosusilo.....	3
2.1	Skema Kerangka Pemikiran	38

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
A	Item Sektor dan Sub Sektor Ekonomi dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur.....	167
B	Ratio LQ Sektor dan Sub Sektor Ekonomi Sub Wilayah Pulau Madura dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah apal Kuda Provinsi Jawa Timur.....	168
C	Ratio LQ Sektor dan Sub Sektor Ekonomi Kabupaten Bangkalan dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah apal Kuda Provinsi Jawa Timur.....	169
D	Ratio LQ Sektor dan Sub Sektor Ekonomi Kabupaten Pamekasan dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah apal Kuda Provinsi Jawa Timur.....	173
E.	Ratio LQ Sektor dan Sub Sektor Ekonomi Kabupaten Sampang dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah apal Kuda Provinsi Jawa Timur.....	177
F	Ratio LQ Sektor dan Sub Sektor Ekonomi Kabupaten Sumenep dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah apal Kuda Provinsi Jawa Timur.....	181
G	Ratio LQ Sektor dan Sub Sektor Ekonomi Sub Wilayah Teluk Madura dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah apal Kuda Provinsi Jawa Timur.....	185
H	Ratio LQ Sektor dan Sub Sektor Ekonomi Kota Surabaya dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah apal Kuda Provinsi Jawa Timur.....	189
I	Ratio LQ Sektor dan Sub Sektor Ekonomi Kabupaten Sidoarjo dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah apal Kuda Provinsi Jawa Timur.....	193
J	Ratio LQ Sektor dan Sub Sektor Ekonomi Sub Wilayah Selat Madura dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah apal Kuda Provinsi Jawa Timur.....	197

K	Ratio LQ Sektor dan Sub Sektor Ekonomi Kabupaten Pasuruan dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah apal Kuda Provinsi Jawa Timur.....	201
L	Ratio LQ Sektor dan Sub Sektor Ekonomi Kota Pasuruan dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah apal Kuda Provinsi Jawa Timur.....	205
M	Ratio LQ Sektor dan Sub Sektor Ekonomi Kabupaten Probolinggo dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah apal Kuda Provinsi Jawa Timur.....	209
N.	Ratio LQ Sektor dan Sub Sektor Ekonomi Kota Probolinggo dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah apal Kuda Provinsi Jawa Timur.....	213
O	Ratio LQ Sektor dan Sub Sektor Ekonomi Kabupaten Situbondo dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah apal Kuda Provinsi Jawa Timur.....	217